

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelatihan memiliki berbagai fungsi dalam masyarakat. Pelatihan bagi upaya untuk mendukung deradikalisasi. Tujuan program pelatihan tersebut adalah mengcounter radikalisasi dengan deradikalisasi. Jawaid (2020) mengemukakan beragam program deradikalisasi dan rehabilitasi untuk para teroris. Keberhasilan program rehabilitasi bergantung pada kemampuan mengidentifikasi faktor utama dan sekunder yang menyebabkan individu untuk berpartisipasi dalam gerakan kekerasan untuk pertama kali. Persoalan program radikalisasi antara lain proses yang mahal dan memakan waktu, menuntut penerimaan dari semua pihak agar efektif terutama untuk napi yang terlibat, memerlukan dukungan berupa partisipasi sukarela dan pendekatan individual, serta memerlukan pemikiran ulang kebijakan yang signifikan dan bahkan sumber daya yang lebih besar. OSCE (2017) sebelumnya menjelaskan bahwa Pelatihan sebagai bentuk deradikalisasi yang merupakan proses kombinasi instrumen tetapi tidak terbatas pada konseling psikologis, pendidikan ulang ideologis, pelatihan kejuruan, sosialisasi ulang, dan peluang kerja. Gill (2020) menambahkan model deradikalisasi *SWAT* difungsikan untuk menghilangkan terorisme dan melawan kekerasan ekstremisme.

Mengenai upaya untuk menanggulangi terorisme, Suyanto dkk., (2019) menjelaskan tentang pentingnya pemahaman kontekstual untuk memecahkan masalah terorisme. Sejalan dengan Elsain (2016) dijelaskan bahwa elemen penting yang berkaitan dengan radikalisasi terdiri atas peran agama dalam proses radikalisasi, memahami konteks lokal termasuk pemahaman masa transisi ke sudut pandang radikal, atau untuk bergabung dengan kelompok radikal. Perubahan dinamika tidak hanya terjadi ketika ada pergeseran dari fase pra-radikalisasi menuju fase identifikasi diri sebagai anggota kelompok radikal. Akan tetapi, ketika mereka sudah terlibat dalam kelompok radikal –dalam meminjam istilah dari Silber dan Bhatt.

Model informasi menjadi salah satu upaya untuk memutus mata rantai radikalisasi seperti dikemukakan Bastug dkk., (2018). Platform media sosial dan internet secara umum telah membuat komunikasi instan yang memberikan keuntungan dan peluang diperolehnya jaringan yang efektif

Robby Mochamad Taufik, 2022

PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENGELOLAAN EKONOMI KREATIF BAGI MANTAN NARAPIDANA TERORISME

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

bagi orang yang mencari konten radikal. Sementara El Said (2015) mengemukakan program deradikalisasi berdasarkan kondisi empiris serta konsep tentang radikalisme maupun terorisme di masing-masing negara mesti ditegaskan secara jelas. Bahkan gagasan di beberapa negara, radikalisme memiliki konotasi positif bahkan revolusioner.

Ada keragaman penanganan radikalisme di berbagai negara. Keadaan dan kondisi di mana deradikalisasi terjadi bervariasi termasuk permasalahan ekonomi. Hubungan antara status ekonomi dan terorisme sangat kontroversial. Hasil penelitian Bhui dkk., (2012 hlm 2) menyatakan bahwa terdapat bukti bahwa ekonomi yang lemah berkontribusi pada proses radikalisasi. Kondisi sosial ekonomi mengarah pada masalah sosial seperti pengucilan, imobilitas sosial, dan politik. Hal itu dapat mendorong munculnya ungkapan keluhan sosial ekonomi yang direspon oleh para penyebar ideologi radikal. Dengan begitu, akses terhadap informasi serta kondisi ekonomi merupakan model untuk memecahkan masalah radikalisme.

Di Indonesia diselenggarakan program untuk penanggulangan terorisme berupa pembangunan kapasitas, keterlibatan, dan pemberdayaan komunikasi strategis. Indonesia mengadopsi proses seleksi di mana otoritas negara mengidentifikasi orang-orang yang membutuhkan program dan menempatkan di fasilitas rehabilitasi terpisah –serupa pusat penahanan. Di Indonesia sendiri, kecenderungan napitersulit diterima dan sering terjadi penolakan oleh masyarakat. Data menunjukkan adanya penolakan terhadap jasad para napi teroris yang meninggal dan penolakan terhadap kehadiran para napi teroris di masyarakat seperti dikemukakan oleh hasil laporan BNPT (2021).

Ada kemungkinan kuat terulangnya terorisme yang direformasi setelah menjalani proses rehabilitasi. Teroris dapat kembali ke kegiatan kriminal setelah rehabilitasi. Mengacu pada data BNPT (2021), beberapa napiteryang ditangkap adalah napi lama yang telah menjalani hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan. Artinya, ada program deradikalisasi yang belum berhasil memutus persoalan radikalisme.

Hilmy (2014 hlm 129) mengemukakan pendekatan umum yaitu sosial politik berdasarkan nilai-nilai hak asasi manusia yang memandang ideologi islamis-radikal dan terorisme dilihat melalui dua sisi secara bersama. Program deradikalisasi dilakukan dengan kerja sama antarlembaga dan kementerian terkait. Di tingkat hulu, dekonstruksi ideologi radikal harus

dilakukan bersamaan dengan menyebarkan ideologi muslim moderat. Pada level hilir, konstruksi teologi moderat disebarluaskan ke seluruh segmen masyarakat agar tidak hanya menjangkau kelas elit dan orang-orang terpelajar, religius, dan akademis. Pendekatan sosiopolitik mempersempit kompleksitas persoalan dalam memahami munculnya radikalisme. Knight (2006 hlm 619) mengemukakan ideologi dapat didefinisikan sebagai cara suatu sistem, seorang individu atau bahkan seluruh masyarakat merasionalisasi dirinya sendiri. Konsep ideologi berkembang dapat mengomunikasikan konsep abstrak yang luas secara efisien termasuk tentang tujuan utopis sebuah penciptaan negara.

Penanganan khusus terkait dengan narapidana dalam konteks Indonesia dikemukakan oleh Sutirno dkk., (2016 hlm 6) mengemukakan bahwa terdapat kebijakan deradikalisasi narapidana terorisme setelah dibebaskan. Berdasarkan model teoretis implementasi kebijakan menurut Grindle (1980 hlm 21), model alternatif yang cocok untuk implementasi kebijakan deradikalisasi tahanan terorisme dan kasus-kasus kekerasan sosial lainnya adalah dengan pendekatan *soft power*. Komunikasi sosial antara pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan visi bersama mengenai terorisme, faktor pemantauan, dan bimbingan berkelanjutan untuk mantan tahanan terorisme yang melibatkan para pemimpin agama dengan pendekatan sosial ekonomi dan agama yang intensif sebagai model penanganan radikalisme.

Model Sutirno dkk., (2016 hlm 6) menjadi dasar untuk pengembangan program yang lebih spesifik dan bersifat kontekstual. Asumsi yang dibangun atas model lanjutan dari Sutirno dkk., (2016) adalah masalah ekonomi dan komunikasi serta integrasi penanganan deradikalisasi. Ideologi terorisme radikal ada dalam pikiran seseorang mengenai sosiopolitik dan dipengaruhi oleh banyak faktor di lingkungan mereka.

Salah satu program yang dilakukan untuk menanggulangi terorisme adalah melalui pelatihan kewirausahaan sesuai dengan Undang undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. BNPT yang dibentuk oleh pemerintah berdasar Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010. menyelenggarakan program pelatihan sebagai program deradikalisasi. Program pelatihan digarapkan memiliki manfaat sebagai program deradikalisasi dan mengembalikan para narapidana ke masyarakat. Pada Narapidana diharapkan melalui program pelatihan tersebut mengalami perubahan pola pikir , sikap, dan perilaku yang lebih baik.

Kebijakan dan strategi pelatihan untuk penanggulangan terorisme membantu meringkas rantai penyebaran ide. Program deradikalisasi dikaitkan dengan proses deradikalisasi yang signifikan pada tiga tingkatan yakni ideologis, perilaku, dan organisasi. Proses deradikalisasi pragmatis berhasil pada level perilaku dan organisasi tetapi gagal meradikalisasi individu atau kelompok pada level ideologis. Namun beberapa masalah seperti Lemahnya reintegrasi program antarinstansi dalam upaya deradikalisasi menjadi masalah ketidakefektifan program.

Program tersebut diselenggarakan berdasarkan fakta empiris di lapangan bahwa faktor ekonomi sebagai salah satu faktor yang menyebabkan suburnya radikalisme dan terorisme. BNPT (2021) selaku koordinator penanggulangan terorisme pada tahun 2021 melakukan pelatihan kewirausahaan agar keluarga narapidana merencanakan masa depan yang lebih baik, bahkan memenuhi kebutuhan mereka selama keadaan darurat seperti pandemi Covid-19.

Upaya untuk mengembalikan para mantan narapidana ke masyarakat mengabaikan aspek ekonomi dan sosial. Proses transisi belum sesuai dengan konteks yaitu tentang perbaikan ekonomi para mantan Napiter. Irwin (2015 hlm 172) mengemukakan bahwa strategi kontra terorisme yang lembut seperti kontra radikalisasi, deradikalisasi dan pelepasan terlalu sering tidak berdasar pada asumsi atau hubungan yang tidak diselidiki antara keadaan psikologis dan hasil perilaku. Upaya untuk mengatasi masalah seperti bimbingan atau pendampingan bagi wirausaha yang berasal dari para mantan Napiter memerlukan dukungan berbagai pihak. BNPT (2021) bekerja sama dengan Hedayah Center untuk memberikan pelatihan lanjutan bagi pekerja sosial, psikolog, dan pemangku kepentingan melalui *The Second Phase of The Supporting Families in CVE Program* sebagai tindak lanjut kesuksesan pelaksanaan *Capacity Building* untuk penanganan keluarga yang terpapar ekstremisme.

Upaya nyata untuk menanggulangi masalah terorisme dan radikalisme yang dilakukan oleh aparaturnya adalah wirausaha. Bimbingan kegiatan wirausaha di Wilayah Kodam III Siliwangi dilakukan terhadap para mantan Napiter agar memiliki kegiatan produktif dan dapat diterima masyarakat. Tujuan dari upaya ini adalah agar para mantan Napiter dapat diterima kembali oleh masyarakat dan mampu mengelola usaha sendiri untuk memperbaiki kondisi ekonomi pascapenahanan. Kegiatan pendampingan dilakukan dengan memberikan bantuan berupa usaha mikro yang dapat meningkatkan pendapatan para mantan Napiter, didukung pula oleh unsur Komunitas

Robby Mochamad Taufik, 2022

PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENGELOLAAN EKONOMI KREATIF BAGI MANTAN NARAPIDANA TERORISME

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

Intelejen Daerah (Kominda) dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopmida) yang membantu mengoordinasikan semua usaha para mantan Napiter antara pemerintah, perusahaan, maupun BUMN.

Upaya untuk deradikalisasi telah dikembangkan berdasarkan konsep pemberdayaan ekonomi melalui pendidikan kewirausahaan kreatif oleh Kodam III Siliwangi. Penguatan kemampuan yang diperuntukkan bagi mantan Napiter dilakukan dengan tiga kegiatan mikro ekonomi antara lain: *pertama*, mengelola usaha kuliner berkelas bintang lima yang diujikan di kaki lima. Upaya ini dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada para mantan-mantan Napiter oleh para ahli masak dari hotel bintang lima yang telah menjadi rekanan kodam III Siliwangi yang dikoordinasikan dengan Bekangdam III Siliwangi yang menangani logistik. Tujuan marketnya adalah cita rasa atau resep setara bintang lima dengan harga disesuaikan dengan masyarakat. *Kedua*, mengelola usaha pertanian dan peternakan dengan tempat budidaya yang telah dikondisikan. Upaya ini dilakukan dengan cara menghadirkan pada pembicara petani dan peternak yang telah sukses disertai dengan penyediaan lahan yang dikoordinasikan dengan pemerintah setempat. *Ketiga*, pelatihan otomotif dan elektronika, pelatihan ini dilaksanakan atas dasar banyaknya peluang untuk membuka usaha atau bekerja di perusahaan.

Setelah melalui proses pendidikan dan pelatihan, para mantan Napiter akan semakin percaya diri, tidak dicurigai, tidak kembali menjadi teroris, dan memiliki pekerjaan baru agar diterima oleh masyarakat sehingga mampu menghadapi persaingan hidup di lingkungan masyarakat. Meskipun tetap diawasi oleh aparat pemerintah terkait dan terkoordinasi.

Hasil observasi terhadap para Napiter di Provinsi Banten diperoleh gambaran bahwa Beberapa masalah yang dihadapi dalam pelatihan 1) tindak lanjut pasca pelatihan kewirausahaan. Para Napiter belum dibantu dalam memperoleh lokasi usaha yang sesuai dan nyaman, kurangnya dukungan keuangan untuk modal. 2) Di sisi lain pelatihan bagi organisasi belum berfungsi sebagai model pengawasan dan pendampingan terhadap para Napiter untuk deradikalisasi, 3) kordinasi antar aparat untuk tindak lanjut pasca pelatihan sangat terbatas. 4) keterampilan yang diperoleh belum terintegrasi kedalam sistem ekonomi kreatif masyarakat

Penguatan kemampuan tersebut terkait pula dengan model ekonomi kreatif yang dibangun. Kemampuan berfikir kreatif yang dimiliki oleh mantan-mantan Napiter, perlu dikembangkan

melalui program pelatihan, sehingga jiwa wirausahawan yang terbangun akan sejalan pula dengan wawasan ekonomi kreatif yang tertanam di dalamnya. Untuk menjadi seorang wirausahawan perlu memiliki kemampuan kreatif dan inovatif yang mampu menciptakan sesuatu baru dan berbeda.

Tujuan ditanamkannya wawasan ekonomi kreatif bagi para mantan-mantan Napiter yaitu mampu memberikan semangat dan kreasi baru dalam menghadapi berbagai kompetitor bisnis di masyarakat. Hasil kreativitas ini terlahir dari proses diskusi dengan narasumber pelatihan, pembina, dan pendamping dari Kodam III Siliwangi, serta masyarakat. Bergeraknya teknologi di era Revolusi Industri 4.0 menuntut pula Napiter untuk beradaptasi dengan perkembangan produk serta market (pemasaran) yang berbasis pada pemanfaatan teknologi. Dengan begitu, apa yang diperlukan bagi Napiter dapat secara nyata menjadi solusi terbaik yang mengesampingkan pengalaman pribadinya termasuk ideologi yang salah.

Setiap pelaksanaan program tersebut selalu terkoordinasi dengan Kominda dan Forkopimda sebagai wujud pembinaan Napiter agar lebih maksimal mendapat bekal kecakapan hidup (*life skill*). Berdasarkan hasil wawancara dengan mantan Napiter, bentuk pembinaan melalui kegiatan mikro ekonomi akan berdampak positif karena komunikasi terjalin dengan baik, dengan harapan mantan Napiter akan menjadi “penyambung lidah” pemerintah untuk mensosialisasikan kewaspadaan terorisme ke depan.

Beberapa asumsi yang mendasari program pemberdayaan mantan Napiter terorisme dengan pendekatan ekonomi kreatif sebagai berikut.

- a. Wirausaha kuliner, usaha pertanian atau peternakan, usaha bidang otomotif dan elektronika disebut sebagai jenis usaha yang familiar di masyarakat. Jenis usaha ini dapat dikembangkan lebih kreatif oleh mantan Napiter dari sisi produk maupun pemasarannya. Pasca pelatihan, mantan Napiter akan ditempatkan oleh aparat keamanan dari Kodim dan Polres untuk membuka usaha di wilayah yang telah disediakan dengan pertimbangan produk dan tempat usaha yang *marketable*. Pembinaan dilakukan oleh Kominda dan Forkopimda yang dikoordinasikan dengan perusahaan swasta dan BUMN di wilayah tersebut.
- b. Kehidupan mantan Napiter setelah keluar dari jeratan hukum pada umumnya menjadi suatu kekhawatiran yang tinggi untuk diterima oleh masyarakat. Apalagi dikenal sebagai mantan Napiter dan pembunuh massal yang bertindak anarki dengan cara berpikir radikalisme. Masyarakat

mengalami ketakutan untuk berhubungan atau berinteraksi langsung dengan mantan Napiter sehingga kebanyakan mantan Napiter akan kembali lagi melakukan aksi terorisme dikarenakan tekanan psikologis yang tidak didukung oleh lingkungan. Berbeda lagi jika mantan Napiter memiliki usaha yang dapat dikelola dengan didukung oleh para tokoh hukum, aparat pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, kesan positif untuk menerima para mantan Napiter di masyarakat sangatlah terbuka. Menurut mantan Napiter kehidupan setelah keluar dari lapas lebih berat, lebih pedih, dan menyakitkan karena mereka sadar bahwa ini akibat kesalahan yang fatal dalam hidupnya di masa lalu. Hal ini menimpa keluarga dan putra-putrinya di lingkungan sekolah sehingga mengakibatkan beberapa keluarga mantan Napiter putus sekolah.

c. Kondisi mantan Napiter saat ini melaksanakan aktivitas sehari-hari yang beragam tetapi mereka tetap bekerja, ada yang bekerja di luar lingkungannya dan ada pula yang bekerja di luar kota sebagai buruh bangunan. Beberapa di antaranya ada yang berjualan aksesoris seperti jepit rambut dan gelang karet, bahkan ada yang menjadi guru ngaji, tidak jarang mereka yang menganggur karena tidak memiliki keahlian sama sekali, sekali-kali mereka dipanggil untuk bekerja di lingkungan instansi Kodim walaupun tidak setiap hari, dan ada pula yang berjualan gorengan dengan pendapatan yang tidak tinggi.

d. Implementasi pembinaan ekonomi kreatif bagi mantan Napiter yaitu pengembangan ekonomi primer dan ekonomi sekunder. Ekonomi primer sendiri merupakan kegiatan ekonomi yang langsung memanfaatkan sumber daya alam. Ekonomi primer yang dikembangkan oleh mantan Napiter antara lain kegiatan kuliner yang diharapkan berkelas bintang lima sebagai menu jajanan kaki lima. Sementara itu, ekonomi sekunder merupakan kegiatan ekonomi yang sudah diolah atau dibudidayakan baik menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Ekonomi sekunder yang dikembangkan oleh mantan Napiter adalah usaha kuliner dan usaha otomotif-elektronika.

Kegiatan kewirausahaan didasarkan pada fakta bahwa keadaan ekonomi mantan Napiter berada di bawah standar kehidupan masyarakat pada umumnya. Upaya untuk kembali hidup “normal” di masyarakat sering dipandang sebelah mata. Mantan Napiter dianggap berbahaya, akibatnya mereka mendapat hambatan akses modal, sumber daya, maupun pemberdayaan keahlian untuk tujuan ekonomi keluarga. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerhati terorisme,

masyarakat, maupun pemerintah termasuk mantan Napiter itu sendiri. Kondisi tersebut sejalan dengan Sumpter dkk., (2019 hlm 1) yang menjelaskan bahwa para napi teroris mengalami kesulitan beradaptasi dengan kehidupan di dalam komunitas dan upaya lembaga pemerintah untuk mengelola proses dinilai kurang optimal. Upaya negara Indonesia untuk memfasilitasi transisi mantan tahanan ekstremis kembali ke masyarakat kekurangan sumber daya. Upaya untuk mengembalikan para napi teroris memerlukan pendekatan dari beragam dimensi agar diterima dan mau kembali ke masyarakat secara sukarela.

Faktanya, dukungan berbagai pihak agar fokus pada pengembangan ekonomi mantan Napiter di masyarakat masih sangat terbatas. Bahkan kesulitan dialami para napi untuk pengembangan potensi ekonomi serta akses modal usaha guna mendukung kegiatan ekonomi kreatif tersebut. Irwin (2015 hlm 172) dalam kesimpulannya menunjukkan bahwa banyak program seperti itu tampaknya tidak jelas atau memiliki tujuan yang bertentangan satu sama lain dan mengakibatkan konsekuensi yang tidak disengaja dan bahkan inflamasi –reaksi negatif yang menyebabkan konflik.

Kegiatan wirausaha terhadap mantan Napiter memerlukan dukungan dari beragam pihak. Menurut hasil penelitian Zuhri (2017 hlm 75), menjelaskan bahwa program deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT selama ini kurang signifikan. Hal ini dikarenakan keluaran program tersebut tidak mengubah spektrum politik sasaran. Ini menandakan perlu adanya pendekatan yang lebih spesifik dalam menyikapi para mantan Napiter.

Hasil program pelatihan wirausaha belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Beragam model-model pelatihan kewirausahaan dikemukakan para ahli. Bertrand dkk., (2018 hlm 1) menjelaskan hasil analisisnya tentang efektivitas dukungan intervensi kewirausahaan di negara berkembang melalui pelatihan. Hasil evaluasi intervensi melalui pelatihan kewirausahaan bisnis dan hibah efektif membina wirausaha dan meningkatkan penghasilan. Namun, intervensi pelatihan kewirausahaan perlu disesuaikan dengan konteks.

Hal ini sejalan dengan McKenzie dan Woodruff (2012 hlm 82) yang mengemukakan sebagian besar bukti sampai saat ini telah difokuskan baik bisnis yang sudah ada atau pada individu yang berketerampilan rendah. Premand dkk., (2018 hlm 92) menambahkan model yang berfokus pada transisi para pemuda dari aktivitas pendidikan untuk bekerja dan masuk ke dunia wirausaha.

Lopez & Souto (2019 hlm 225) menjelaskan pelatihan kewirausahaan banyak memiliki masalah kesenjangan bahkan dengan kontradiksi pada hasil, terdapat beragam aspek dan hubungan yang tidak diketahui. Meskipun pelatihan kewirausahaan dapat meningkatkan pasar dan tenaga kerja hasil individu, sedikit yang diketahui tentang dampak pelatihan kewirausahaan tentang wirausaha (Gavigan, dkk., 2020 hlm 2).

Masalah lain dalam perancangan pelatihan kewirausahaan adalah lemahnya kontrol terhadap sikap kewirausahaan. Konczol (2004 hlm 129) membedakan pelatihan kewirausahaan dengan sistem pendidikan secara formal. Karakteristik pelatihan kewirausahaan: 1) dijelaskan beberapa program berkualitas yang disediakan oleh yayasan, organisasi regional, pemerintah daerah, perusahaan pelatihan yang berorientasi bisnis; 2) ada program pelatihan sesuai dengan kebutuhan tanpa kontrol atau kualifikasi apa pun; dan 3) ada beberapa elemen yang hilang dalam pelatihan kewirausahaan. Para peserta pelatihan kewirausahaan memperoleh berbagai masalah praktis, tetapi mereka tidak dapat berfungsi sebagai sarana pengembangan sikap kewirausahaan yang stabil. Ada masalah nyata bahwa ada program pelatihan kewirausahaan tanpa kendali atau kualifikasi tertentu.

Pelaksanaan pelatihan kewirausahaan untuk mantan Napiter tidak hanya fokus pada masalah ekonomi atau meningkatkan pendapatan. Manan Napiter memerlukan pendekatan pendidikan untuk mengubah ideologi dan pandangan terhadap ide radikal agar lebih toleran. Ekonomi kreatif dengan pendekatan ideologi kebangsaan dapat memecahkan masalah kesenjangan. Hal ini seperti dikemukakan European Creative Industries Summit (2015 hlm 4) bahwa pengembangan dan pertumbuhan ekonomi kreatif dapat menimbulkan kesenjangan sosial. Namun, ekonomi kreatif dapat memperbaiki ketidaksetaraan. Sepanjang proses tersebut juga membawa perubahan struktural yang lebih luas untuk memastikan bahwa pekerja kreatif sendiri tidak dirugikan dalam kaitannya dengan pekerja lain. Deradikalisasi bisa efektif tanpa perlu program formal dan mungkin tidak memerlukan tindakan terkoordinasi untuk menjalankannya (Dechesne, 2011 hlm 288).

Adapun pendekatan ideologi melalui proses pendidikan dan interaksi sosial menjadikan pelatihan kewirausahaan ekonomi kreatif sebagai fondasi untuk mendekonstruksi pemahaman tentang Pancasila sebagai ideologi kebangsaan bagi mantan Napiter sangat diperlukan. Hal ini

didasarkan pada pemahaman bahwa ancaman terhadap sistem kepercayaan nilai-nilai kebangsaan yang mempersatukan warga negara sebagai bagian dari keragaman sebagai sesuatu yang nyata. Gagasan politik ideologi negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meminimalisir adanya disintegrasi bangsa dan radikalisme Indonesia multi *religion*. Hoon (2017 hlm 476) mengemukakan konsep tentang menempatkan agama dan multikulturalisme sebagai konsep yang bersumber pada pemahaman tentang fungsi ideologi bangsa. Wawasan kebangsaan serta nilai-nilai ideologi dipelajari sebagai bagian dari deradikalisasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, kontribusi penelitian terhadap pendidikan nonformal serta upaya pemberantasan terorisme lebih tepatnya menjadi pendekatan yang bersifat *soft power*. Dengan begitu, eksplorasi mengenai rencana, implementasi pelatihan yang telah diselenggarakan instansi terkait perlu dilakukan. Gellert (2014 hlm 477) mengemukakan optimisme dan pendidikan sebagai ideologi pembangunan berdasarkan keragaman struktur masyarakat di Indonesia. Koehler & Fiebig (2019 hlm 57) mengemukakan bahwa telaah mengenai program dan pengalaman praktisnya untuk program deradikalisasi sesuai dengan jenis, kelompok sasaran, dan efeknya masih jarang dikemukakan.

Diperlukan telaah mengenai perancangan diklat kewirausahaan yang menyeluruh sesuai konteks. Maaravi dkk., (2020 hlm 234) menyarankan sesuai dengan hasil penelitiannya bahwa penelitian di masa depan harus lebih baik membedakan antara kegiatan pelatihan yang ada, kontekstual, dan lebih relevan dengan kegiatan kewirausahaan. Penelitian fokus pada program pelatihan kewirausahaan yang berbeda baik yaitu konten dan peserta diklat. Sejalan dengan Lopez dan Souto (2019 hlm 225) yang menyarankan agar penelitian fokus pada pelatihan spesifik kewirausahaan untuk inovasi dan etika.

Peningkatan kapasitas kewirausahaan membutuhkan pelatihan spesifik yang membahas masalah etika bisnis. Xu dan Zia (2012 hlm 42) dan Lafortune dkk., (2018 hlm 225) sama-sama sepakat dengan mengemukakan terdapat heterogenitas yang tinggi dalam program pelatihan kewirausahaan yang ditawarkan. Oleh karena itu, identifikasi komponen berbeda dalam program pelatihan diperlukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Lafortune dkk., (2018 hlm 244) menegaskan diperlukan penelitian terhadap kelompok setidaknya intervensi khusus untuk subkelompok dengan lebih banyak program standar. Gielnik dkk., (2017 hlm 334) menambahkan

bahwa pelatihan kewirausahaan memang efektif. Namun, pemahaman tentang teori mengenai proses dinamis setelah pelatihan yang mengarah ke penciptaan bisnis perlu ditegaskan bahwa identifikasi untuk memeriksa pengaruh sejauh mana motivasi orang meningkat, menurun, atau tetap stabil seiring waktu perlu dilakukan lebih lanjut. Konzol dkk., (2004 hlm 127) mengemukakan lemahnya koordinasi dalam penyelenggaraan pelatihan untuk kewirausahaan masyarakat. Koordinasi berbagai rencana dan program pembangunan perlu ditingkatkan agar pelatihan kewirausahaan memiliki pencapaian nyata, misalnya mempromosikan sikap dan meningkatkan kegiatan kewirausahaan di masyarakat.

Didasarkan atas upaya pemecahan yang dilakukan melalui pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi kreatif, dalam kajian ini perlu dikaji tentang bagaimana Implementasi Pelatihan Kewirausahaan untuk Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Ekonomi Kreatif bagi Mantan Narapidana Terorisme di Propinsi Banten

1.2 Identifikasi, Rumusan Permasalahan, dan Pertanyaan Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperoleh beberapa permasalahan penelitian yang dikaji sehingga penelitian ini dirasa penting dilakukan. Sesuai dengan hasil wawancara dan tatap muka yang dilakukan oleh peneliti kepada BNPT, dihadiri oleh para instansi yang mengawasi bidang terorisme terdapat beberapa harapan para mantan narapidana terorisme tersebut di antaranya:

- a. Perencanaan pelatihan kewirausahaan untuk mantan Napiter masih terbatas. Mantan narapidana terorisme belum banyak diarahkan untuk pengembangan ekonomi kreatif secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai instansi pendukung. Potensi ekonomi yang dimiliki belum sepenuhnya dieksplorasi dan diarahkan untuk mendukung peningkatan ekonomi keluarga mantan Napiter dengan dukungan berbagai pihak.
- b. Lemahnya reintegrasi dan koordinasi dalam perencanaan program di antara instansi terkait dalam upaya deradikalisasi. Upaya untuk mempromosikan, mengoordinasikan, dan menjangkau pihak-pihak lain untuk terlibat dalam penanggulangan terorisme masih kurang. Upaya

untuk berbagi pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan pelajaran yang dipetik tentang intervensi kontra-terorisme di antara instansi, tokoh masyarakat, dan masyarakat masih kurang.

c. Pengembangan dan pemberdayaan potensi mantan Napiter untuk ekonomi produktif terbatas pada kelompok mantan Napiter dan aparat instansi tertentu. Pemberdayaan belum banyak melibatkan lintas institusi, tokoh masyarakat, pemuda, maupun masyarakat secara umum baik untuk kegiatan ekonomi produktif maupun deradikalisasi.

d. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan ekonomi kreatif bagi mantan narapidana terorisme terhambat masalah koordinasi dan kemitraan untuk menjamin implementasi program deradikalisasi.

1.2.2 Rumusan Masalah

Atas dasar identifikasi masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah utama penelitian ini adalah “Bagaimana pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan ekonomi kreatif bagi mantan narapidana terorisme?”. Untuk menjawab rumusan masalah di atas, disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1.2.3 Pertanyaan Penelitian Sebagai Berikut:

a. Bagaimana perencanaan pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan ekonomi kreatif bagi mantan narapidana terorisme?

b. Bagaimana pelaksanaan pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan ekonomi kreatif bagi mantan narapidana terorisme?

c. Bagaimana hasil penilaian pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan ekonomi kreatif bagi mantan narapidana terorisme?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis implementasi pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan ekonomi kreatif bagi mantan narapidana terorisme. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

a. Perencanaan pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan ekonomi kreatif bagi mantan narapidana terorisme;

Robby Mochamad Taufik, 2022

PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENGELOLAAN EKONOMI KREATIF BAGI MANTAN NARAPIDANA TERORISME

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

- b. Pelaksanaan pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan ekonomi kreatif bagi mantan narapidana terorisme, dan
- c. Hasil penilaian pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan ekonomi kreatif bagi mantan narapidana terorisme.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoretis hasil dan temuan penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan keilmuan dan kajian pemberdayaan masyarakat. Adapun secara khusus berkaitan dengan pengelolaan model ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, akan memperkuat dan memperkaya khasanah keilmuan dalam upaya pemberdayaan ekonomi bagi mantan narapidana terorisme.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pemegang kepentingan terutama yang membidangi masalah terorisme, tidak saja pada institusi TNI, Polri, dan BNPT maupun instansi lain yang tergabung dalam wadah penanganan terorisme secara terkoordinasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Berdasarkan penjelasan di atas, sistematika pembahasan penelitian ini terdiri atas lima bab sebagai berikut. Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, permasalahan identifikasi masalah, perumusan masalah, pertanyaan penelitian dilanjutkan dengan tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan terkait dengan gerakan radikalisme, dan penanganan terorisme dalam program deradikalisasi.

Bab kedua membahas kajian pustaka tentang konsep teori pemberdayaan masyarakat, kewirausahaan, ekonomi kreatif, dan konsep terorisme. Kajian pustaka ini akan mendasari analisis teoritis dan indikator pertanyaan penelitian yang bersumber dari referensi yang relevan.

Bab ketiga membahas metode penelitian yang terdiri atas lokasi penelitian, pendekatan penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat akan menjawab seluruh pertanyaan penelitian berdasarkan indikator pertanyaan yang telah dikembangkan ke dalam instrument. Selanjutnya akan diungkap pada menguraikan simpulan bagian hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

Bab kelima berisi simpulan dan saran yang, saran, dan rekomendasi hasil penelitian untuk dapat dilanjutkan menjadi bahan kebijakan.